BAB III
ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

3.1 Sejarah Singkat Instansi

Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008, TENTANG, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang :

A. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu malakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
B. Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sekaligus terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta upaya mendukung peningkatan pelayanan pablik maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat;
C. Bahwa brdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Dinas Daerah kabupaten Bandung Barat;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);

3. Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan Peerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyususnan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7).

3.2 Tujuan Perusahaan/Instansi (Visi dan Misi Instansi)

3.2.1 Visi Perusahaan/Instansi

"UPTD Kecamatan Cililin menjadi akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pendididkan yang berkualitas guna mendukung Visi Bandung Barat 2010"

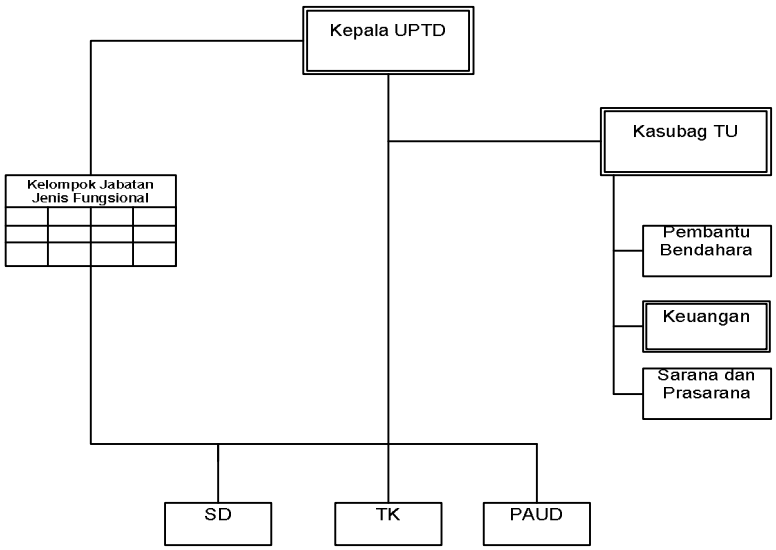
3.2.2 Misi Perusahaan/Instansi

Misi dari UPTD Kecamatan Cililin adalah:

A. Membangun koordinasi dan Sinergitas antar Lini, Unit dan Institusi dalam manejemen pendidikan di Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cililin yang terintegrasi berdasarkan tugas, fungsi, dan peran masimg-masing.
B. Menciptakan Suasana kondusif di dunia pendidikan dalam upaya meningkatka kualitas pendidikan.
C. Meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi

3.3.1 Struktur Orgnisasi UPTD Kecamatan Cililin



Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPTD Kecamatan Cililin

3.3.2 Deskripsi Jabatan (*Job Description)* UPTD Kecamatan Cililin

A. Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan pembinaan TK/SD dan PNF di wilayah kerjanya.

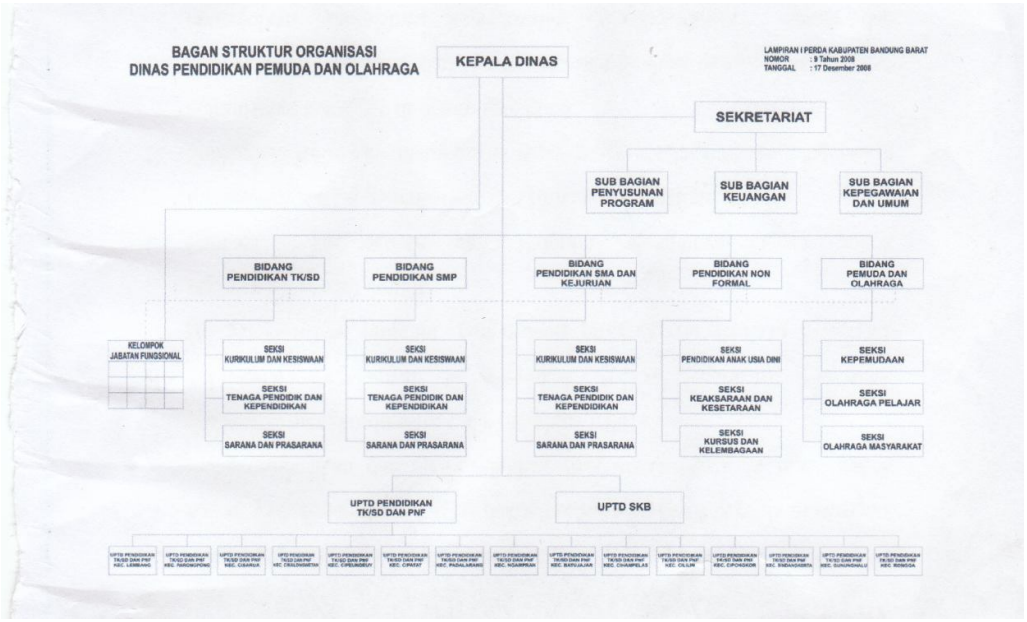
B. Kasubag TU

Kasubag TU mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja.

3.3.3 Struktur Organisasi KBB (Kabupaten Bandung Barat)



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kabupaten Bandung Barat

3.4 Kebijakan Perusahaan

A. Laporan Keuangan Berupa Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat setiap tri wulan.
B. Anggaran Dana BOS yang diberikan kepada sekolah untuk masa anggaran 1 tahun tetapi dicairan setiap tri wulan.
C. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan dana BOS berupa:
    1. Pendaftaran Siswa Baru
    2. Pengadaan Buku Teks Pelajaran
    3. Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan
    4. Membiayai Kegiatan Kesiswaan
    5. Ujian Sekolah, Ulum Harian dan UKK
    6. Membeli Bahan-Bahan Habis Pakai
    7. Membayar Daya dan Jasa
    8. Membiayai Perawatan Ringan
    9. Honororium Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
    10. Pengembangan Profesi Guru
    11. Pemberian Bantuan Tranfort Bagi Siswa Miskin
    12. Membiayai Pengelolaan BOS
    13. Pembelian Personal Komputer
    14. Media Pembelajaran dan Membeler Sekolah
D. Laporan Pertanggung jawabah harus wajar dan tepat waktu
E. Laporan Pertanggung jawaban mempunyai sifat rahasia atau tidak bisa dilihat oleh sembarang orang.
F. Metode pencatatan yang dipakai adalah metode pencatatan *single entry*, maksudnya transaksi dicatat dua kali disebut juga dengan proses menjurnal.
G. Dokumen yang digunakan untuk pencairan dana adalah rekening sekolah dan Surat Perjanjian Pemberian Dana.
H. Akuntansi pemerintah disusun dan diopasikan berdasarkan dana.
I. Semua pendapatan yang diterima dan belanja yang dikeluarkan akan dipertanggung jawabkan seluruhnya.
J. Pegawai yang bekerja diwajibkan minimal keluaran/lulusan Diploma3 (D3).

3.5 Fungsi Yang Terkait

Fungsi yang terkait pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Bidang Pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Cililin:

A. SDN

SDN mengisi format BOS KBB-2 dan BOS-8 untuk usulan bantuan operasional sekolah (BOS), membuat RKAS, melakukan pengambilan dana ke BANK, membuat LPJ (Laporan Pertangung Jawaban).

B. UPTD

UPTD menerima format BOS KBB-2 dan BOS-8 dan melakukan pendataan ulang atas format BOS KBB-2 dan BOS-8, menerima RKAS, menerima LPJ dari SDN dan melaporkannya.

C. TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat

TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat menerima daftar format BOS KBB-2 dan BOS-8 dari UPTD, melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar format BOS KBB-2 dan BOS-8, membuat ACC daftar rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-8, menetapkan daftar calon penerima BOS kemudian membuat surat keputusan. Menerima daftar sekolah penerima bantua dana BOS dan rekenig sekolah kemudian membuat surat perjanjian pemberian bantuan.

D. TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat

Menerima ACC rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-8 dan surat keputusan TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat kemudian mengajukan SPP-LS dana BOS. Menerima SP2D dari KPPN, melakukan pencairan dana, menghasilkan data sekolah penerima bantuan dana BOS dan rekening sekolah.

E. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Menerima SPP-LS dari TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat, melakukan verifikasi atas SPP-LS dan menghsilkan SPM-LS.

F. KPPN Provinsi

Menerima SPM-LS dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melkukan verifikasi terhadap SPM-LS dan menghasilkan SP2D.

G. BANK

Menerima data sekolah penerima bantuan dana dari dari TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat juga menerima surat keputusan dan rekening sekolah dari TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat dan melakukan pencairan dana ke SDN.

3.6 Dokumen/Formulir Yang Digunakan

A. Format BOS KBB-2 dan BOS-8

Format BOS KBB-2 adalah format yang berisi tentang keadaan sekolah, keadaan siswa, keadaan guru dan biodata kepala sekolah sedangkan BOS-8 adalah format yang berisis tentang daftar nama siswa miskin yang dibebaskan dari segala jenis pungutan biaya.

B. ACC Rekapitulasi Format BOS KBB-2 dan BOS-8

ACC Rekapitulasi Format BOS KBB-2 dan BOS-8 adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan SPP-LS.

C. Surat Keputusan

Surat Keputusan adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan SPP-LS.

D. SPP-LS

SPP-LS adalah surat perintah pembayaran langsung yang digunakan untuk perintah pencairan dana yang akan menghasilkan SPM-LS.

E. SPM-LS

SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung yang digunakan untuk perintah membayar yang akan menghasilkan SP2D.

F. SP2D

SP2D adalah surat perintah pencairan dana yang digunakan untuk perintah pencairan dana.

G. Data sekolah Penerima Dana Bantuan BOS dan Rekening Sekolah

Data sekolah Penerima Dana Bantuan BOS adalah dokumen yang digunakan untuk mengetahui sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan dana BOS sedangkan rekening sekolah digunakan untuk mengetahi no rekening tiap sekolah. Dan untuk membuat surat perjanjian pemberian bantan.

H. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan adalah dokumen yang harus di bawa pihak sekolah pada saat akan mengambil dana ke bank.

I. LPJ

LPJ adalah dokumen yang dibuat sebagai laporan pertanggung jawaban sekolah untuk kegiatan apa saja dana BOS yang sudah cair dan mereka terima.

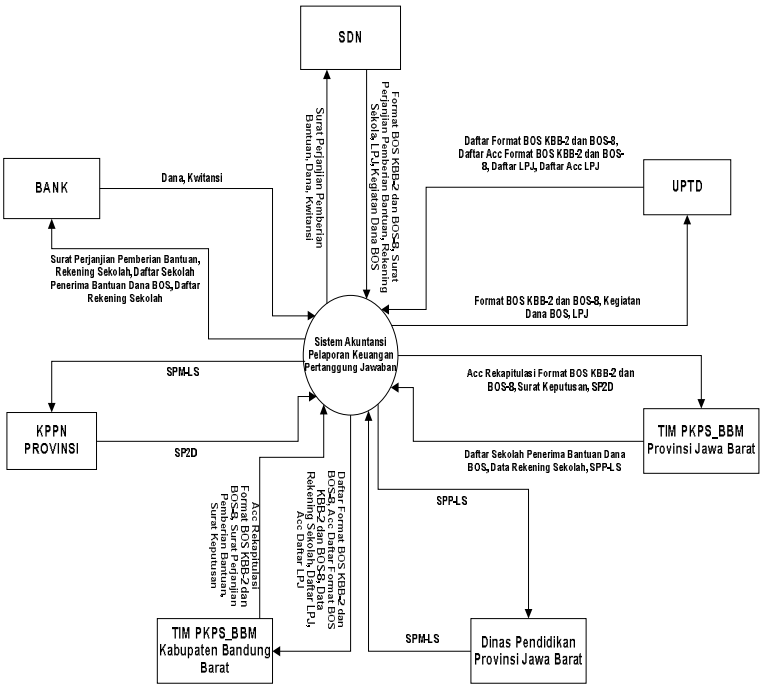
J. Acc LPJ

Acc LPJ adalah laporan pertanggung jawaban yang telah di Acc oleh kepala UPTD.

3.7 Sistem Akuntansi yang Berjalan

3.7.1 Diagram Konteks Yang Berjalan

Diagram Konteks digunakan untuk menggambarkan sistem dan lingkungan luar yang saling berhubungan. Diagram konteks sebagai transformasi suatu sistem yang dapat mentransformasikan *data flow input* menjadi *output*.



Gambar 3.3 Diagram Konteks

Keterangan:

1. Dana BOS : Dana Bantuan Operasiona Sekolah
2. RKAS : Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah
3. SPP-LS : Surat Perintah Pencairan-Langsung
4. SPM-LS : Surat Perintah Membayar-Langsung
5. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
6. LPJ : Laporan Pertanggung Jawaban
7. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Dinas

Deskripsi dari gambar di atas adalah, dimulai dari:

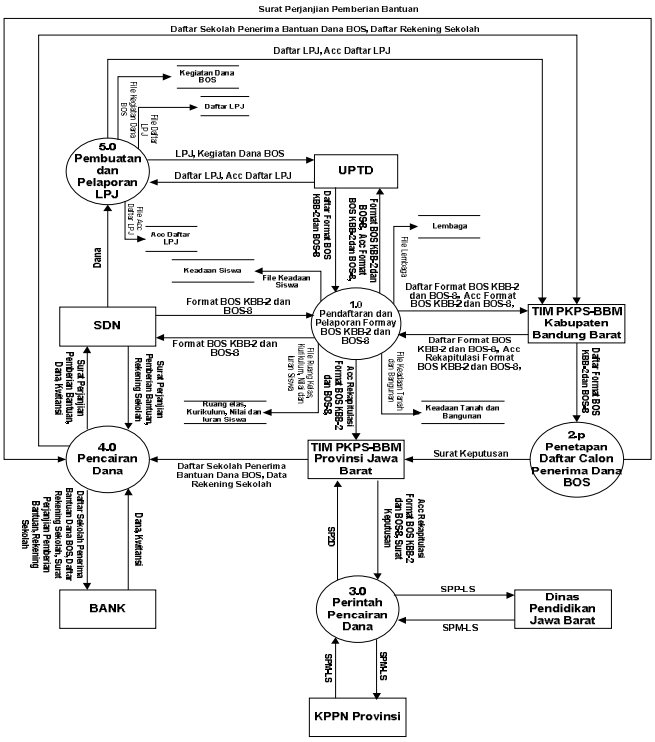
A. SDN mengisi format BOS KBB-2 dan BOS-08, menyerahkan rekening sekolah, LPJ dan kegiatan dana BOS. Menerima surat perjanjian pemberian bantuan dan memberikannya ke bank untuk penganbilan dana.
B. UPTD menerima format BOS KBB-2 dan BOS-08, LPJ dan kegiatan dana BOS, juga memberikan daftar format BOS KBB-2 dan BOS-08 dan Acc daftar format BOS KBB-2 dan BOS-08 juga memberikan daftar LPJ dan Acc daftar LPJ.
C. TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat menerima daftar format BOS KBB-2 dan BOS KBB-08 dan Acc daftar format BOS KBB-2 dan BOS KBB-08. Menerima data sekolah penerima bantuan dana BOS dan data rekening sekolah untuk membuar surat perjanjian pemberian bantuan, juga menerima daftar LPJ, Acc daftar LPJ. Juga menyerahkan Acc rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-8, surat perjanjian pemberian bantuan dan surat keputusan.
D. TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat menrima ACC rekapitulasi format BOS-2 dan BOS-08, surat keputusan dan SP2D. Juga menyerahkan daftar sekolah penerima bantuan dana BOS, dat rekening sekolah dan SPP-LS.
E. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menerima SPP-LS untuk membuat SPM-LS.
F. KPPN Provinsi menerima SPM-LS untuk membuat SP2D.
G. BANK menerima surat perjanjian pemberian bantuan, rekening sekolah, daftar sekolah penerima dana bantuan BOS, data rekening sekolah untuk mencairkan dana ke SDN.

3.7.2 *Data Flow Diagram* Yang Berjalan

Data Flow Diagram berfungsi untuk menggambarkan sistem yang ada pada diagram konteks menjadi beberapa proses utama yang terjadi antara entitas yang terkait dalam Sistem Akuntansi Keuangn Daerah.

3.7.2.1 *Data Flow Diagram* Yang Berjalan Level 0

Data Flow Diagram level 0 akan diterangkan proses dari Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang berjalan. Pada level 0 ini terdiri dari proses pendataan dan pelaporan format BOS KBB-2 dan BOS-8, proses penetapan daftar calon penerima dana bantuan BOS, proses perintah pencairan dana, proses pencairan dana dan proses pembuatan dan pelaporan LPJ.



Gambar 3.4 DFD Level 0

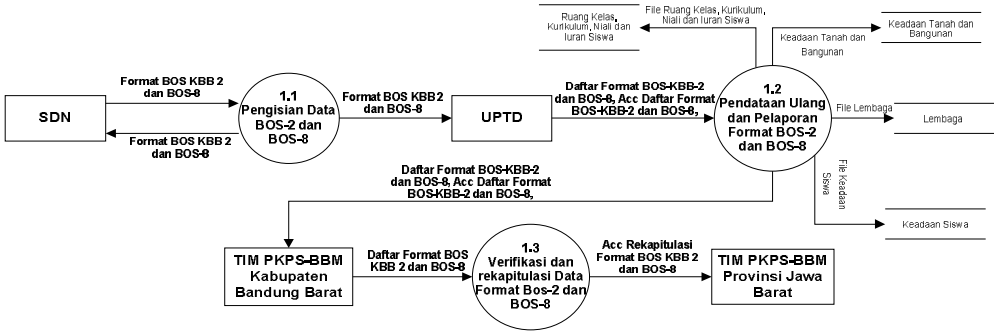
Deskripsi di atas adalah di mulai dari:

1. Pada proses pendataan dan pelaporan format BOS KBB dan BOS-08 SDN mengisi format BOS KBB-2 dan KBB-08 untuk di verivikasi dan di rekapitulasi oleh TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat sehigga menghasilkan ACC rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-08 yang diberikan ke pada TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.

2. Pada proses penetapan daftar calon penerima dana BOS yang dilakukan oleh TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat menghasilkan surat keputusan yang diberikan ke pada TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.
3. Pada proses perintah pencairan dana TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat menerima ACC rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-08 menghasilkan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D.
4. Pada Proses Pencairan dana SP2D diterima oleh TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat menghasikan data sekolah penerima dana bantuan dan data rekening sekolah. Bank menerima data sekolah penerima dana bantuan dan data rekening sekolah dari TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat dan juga menerima surat perjanjian pemberian bantuan dan rekening sekolah dari SDN. BANK memberikan dana ke SDN.
5. Pada proses pembuatan dan Pelaporan LPJ SDN menerima dana dari BANK yang menghasilkan daftar LPJ dan Acc daftar LPJ yang nantinya akan diserahkan ke UPTD dan TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat.

3.8.2.2 *Data Flow Diagram* yang Berjalan Level 1 Proses 1

Pada bagian ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 0 sistem yang berjalan yaitu proses pembuatan dan pelaporan format BOS-KBB-2 dan BOS-08.



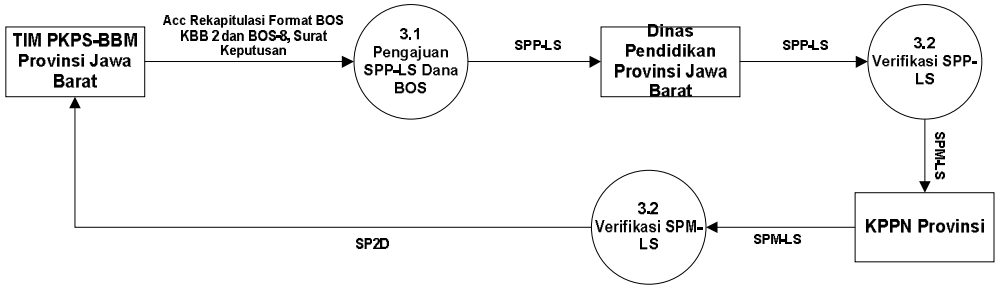
Gambar 3.5 DFD Level 1 Proses 1

Deskripsi gambar di atas adalah SDN juga mengisi data format BOS-2 dan BOS-08, diterima oleh UPTD kemudian UPTD melakukan pendataan ulang dan pelaporan menghasilkan daftar format BOS-2 dan BOS-08 dan Acc daftar format BOS-2 dan BOS-08 diberikan ke TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat

lalu di verivikasi dan direkapitulasi menghasilkan ACC rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-8 yang diberikan ke TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.

1.8.2.3 *Data Flow Diagram* Level 1 Prose 3

Pada bagian ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 0 sistem yang berjalan yaitu proses perintah pencairan dana.

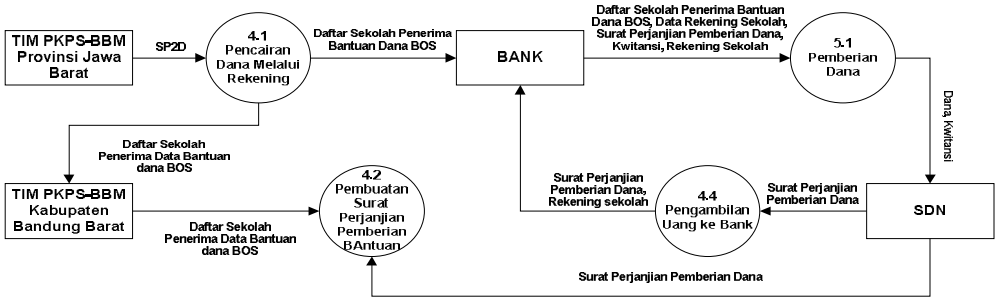


Gambar 3.6 DFD Level 1 Proses 3

Deskripsi gambar di atas adalah TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat mengajukan surat perintah pencairan dana langsung (SPP-LS) atas dasar ACC rekapitulasi format BOS-2 dan BOS-08 dan surat keputusan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian SPP-LS diverifikasi menghailkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) yang diberikan ke KPPN Provinsi, kemudian SPM-LS diverivikasi dan menghasilkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diberikan ke TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.

3.8.2.4 *Data Flow Diagran* Level 1 Proses 4

Pada bagian ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 0 sistem yang berjalan yaitu proses pencairan dana.

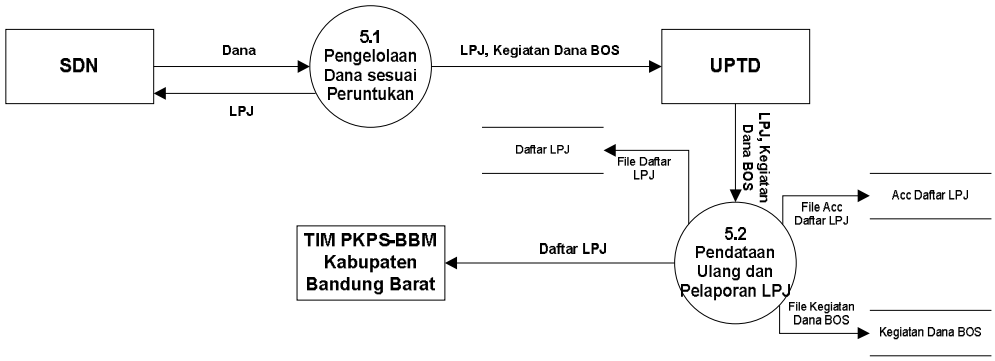


Gambar 3.7 DFD Level 1 Proses 4

Deskripsi gambar di atas adalah TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat melakukan pencairan dana atas dasar SP2D melalui rekening menghailkan data sekolah penerima dana bantuan BOS dan rekening sekolah yang diterima oleh BANK dan TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat. TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat membuat surat perjanjian pemberian bantuan yang diberikan ke SDN kemudian SDN melakukan pengambilan uang ke bank dengan membawa surat perjanjian pemberian dana dan rekening sekolah. Bank melakukan pencairan dana ke SDN pada saat menerima data sekolah penerima dana bantuan BOS dan rekening sekolah dari TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat dan surat perjanjian pemberian dana dan rekening sekolah dari SDN.

1.8.2.5 Data *Floe Diagram* Level 1 Proses 5

Pada bagian ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 0 sistem yang berjalan yaitu proses pembuatan dan pelaporan LPJ.



Gambar 3.8 DFD Level 1 Proses 5

Deskripsi gambar di atas adalah SDN membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan kegiatan dana BOS dari dana yang diterima. LPJ dan kegiatan dana BOS diberikan Ke UPTD kemudian UPTD melakukan pendataan uang LPJ menghasilkan daftar LPJ dan Acc daftar LPJ kemudian melaporkannya ke TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.

3.7.3 Kamus Data Yang Berjalan

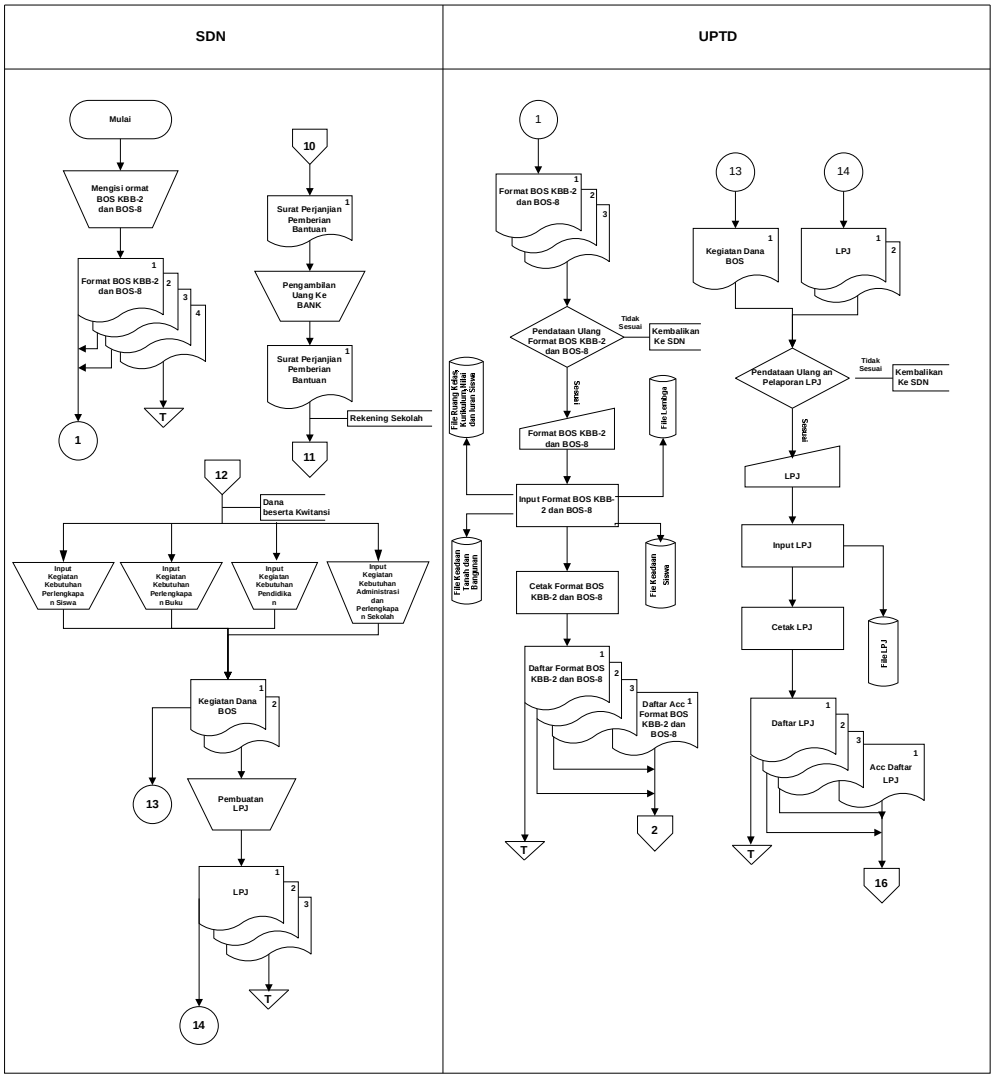
Kamus data yang berjalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 3.1 Kamus Data Berjalan

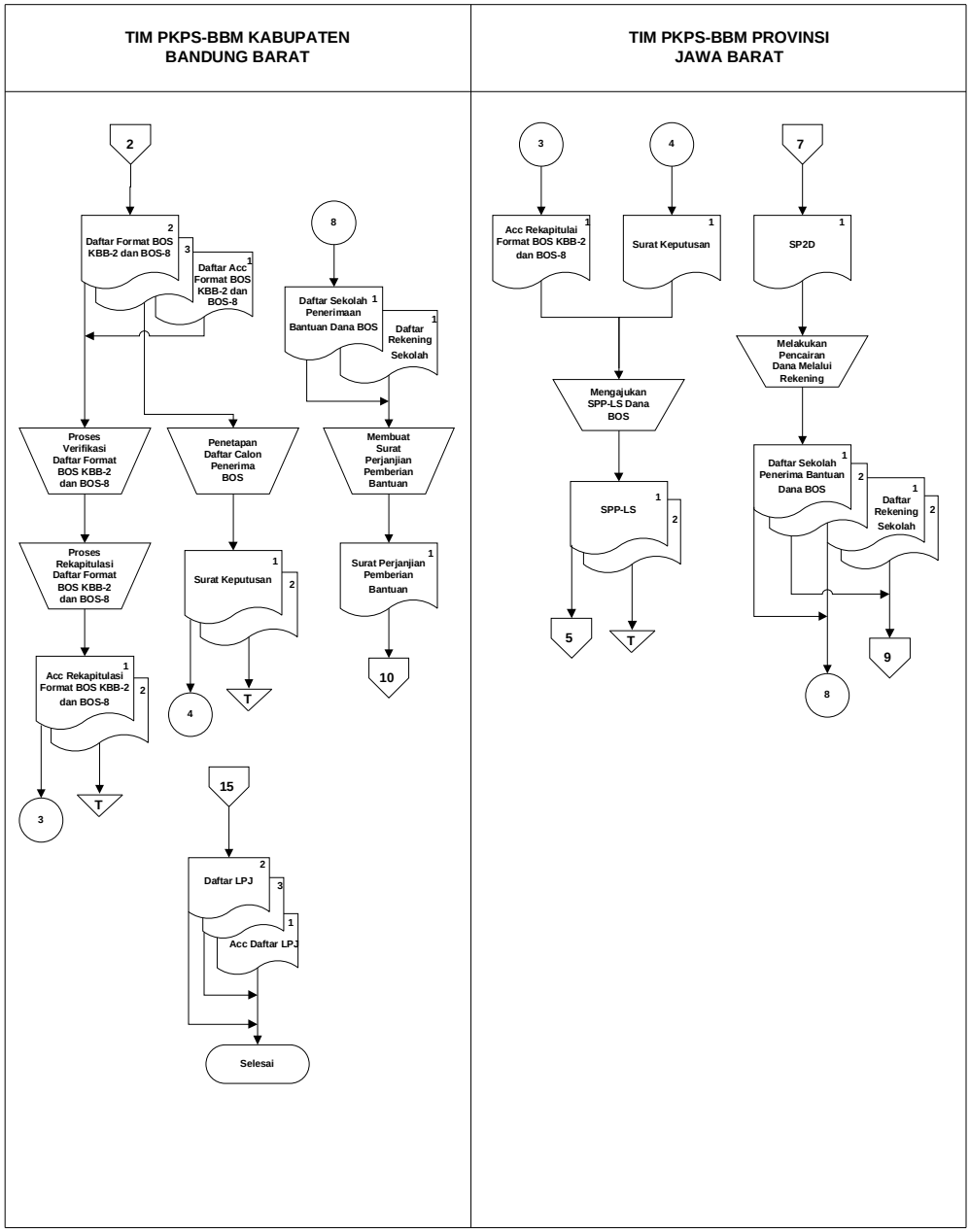
Nama Arus Data	Alias	Bentuk Data	Arus Data	Penjelasan
Format BOS KBB-2 dan BOS-8	-	Dokumen	SDN Proses 1 UPTD	Proses Pembuatan Format BOS KBB-2 dan BOS-8
			UPTD Proses 1 TIM PKPS-BBM KBB	
			TIM PKPS-BBM KBB Proses 1	
			TIM PKPS-BBM KBB Proses 2	
Daftar Format BOS KBB-2 dan BOS-8	-	Dokumen	Proses 1 TIM PKPS-BBM KBB	
			TIM PKPS-BBM KBB proses 2	
			Proses 1 UPTD Proses 5	
Acc Format BOS-KBB-2 dan BOS-8	-	Dokumen	TIM PKPS-BBM KBB proses 1	Proses Acc Format BOS-KBB-2 dan BOS-8
			Proses 1 TIM PKPS-BBM Prov Jabar	
Acc Rekapitulasi Format BOS KBB-2 dan BOS-8	-	Dokumen	Proses 1 TIM PKPS-BBM Prov. Jabar	Proses Pengajuan SPP-LS
			TIM PKPS-BBM Prov. Jabar	
Surat Keputusan	-	Dokumen	Proses 2 TIM PKPS-BBM Prov. Jabar	
SPP-LS	-	Dokumen	Proses 3 Disdik Provinsi Jabar	Proses Verifikasi Atas SPP-LS
			Disdik Provinsi Jabar Proses 3	
SPM-LS	-	Dokumen	Proses 3 KPPN Provinsi	Proses Verivukasi Terhadap SPM-LS
			KPPN Provinsi Proses 3	
SP2D	-	Dokumen	Proses 3 TIM PKPS-BBM Prov. Jabar	Proses Pencairan Dana Melalui Rekening
Daftar Sekolah Penerima Bantuan Dana BOS	-	Dokumen	TIM PKPS-BBM Prov. Jabar Proses 4	Proses Pemberian Dana
			Proses 4 BANK	
Data Rekening Sekolah	-	Dokumen	TIM PKPS-BBM Prov. Jabar Proses 4	Proses Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
			Proses 4 TIM PKPS-BBM KBB	
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan	-	Dokumen	TIM PKPS KBB Proses 4	Proses Pengambilan Uang Ke BANK
			Proses 4 SDN	
			SDN Proses 4 BANK	
Kegiatan Dana BOS	-	Dokumen	Proses 5 UPTD	Proses Input Kegiatan Dana BOS
			UPTD Proses 5	
LPJ	-	Dokumen	Proses 5 UPTD	Proses Pembuatan fdan Pelaporan LPJ
			UPTD Proses 5 TIM PKPS-BBM KBB	
Daftar LPJ	-	Dokumen	UPTD Proses 5	
			Proses 5 TIM PKPS-BBM KBB	
Acc LPJ	-	Dokumen	UPTD Proses 5	
			Proses 5 TIM PKPS-BBM KBB	

3.7.4 Bagan Alir Sistem Yang Berjalan

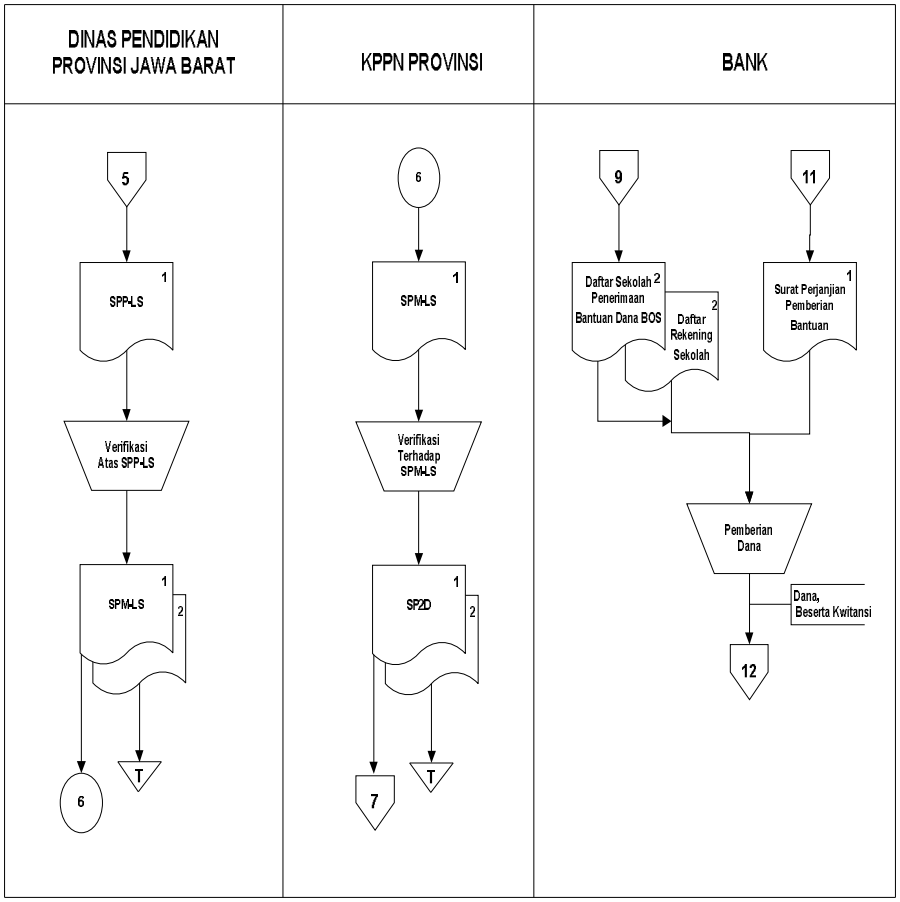
Bagan alir sistem merupakan bagan air yang menunjukan arus aliran informasi berdasarkan pada prosedur. Pengolahan sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang sedang berjalan dapat dilihat dalam bagan alir sistem informasi akuntansi pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.9 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pertanggungjawaban Kegiatan Dana BOS (1)



Gambar 3.10 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pertanggungjawaban Kegiatan Dana BOS (2)



Gambar 3.11 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan Pertanggungjawaban Kegiatan Dana BOS (3)

Deskripsi dari gambar 3.9, gambar 3.10 dan gambar 3.11 adalah:

A. SDN mengisi format BOS KBB-2 dan BOS-08 kemudian mencetaknya sebanyak empat rangkap, satu diarsipkan tiga rangkap diberikan ke UPTD. UPTD melakukan pendataan ulang dan pelaporan format BOS KBB-2 dan BOS-08 jika format tidak sesuai maka dikembaikan ke SDN jika sesuai maka UPTD mendata ulang format dan mengAcc format 3 rangkap berupa format BOS KBB-2 dan BOS-8 2 rangkap diberikan ke TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat satu rangkap diarsipkan dan satu rangkap berupa Acc daftar format BOS KBB-2 dan BOS-8 yang diberikan ke TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat. TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat melakukan proses verifikasi dan rekapitulasi daftar format BOS KBB-2 dan

BOS-08 menghasilkan dua rangkap ACC Rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-08 satu diarsipkan dan satu ladi diberikan ke TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.

B. Dari daftar format BOS KBB-2 dan BOS-08 yang diterima oleh TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat juga dilakukan proses penetapan daftar calon penerima BOS yang menghasilkan dua rangkap surat keputusan, satu diarsipkan satu lagi diberikan ke padaTIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.
C. TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat menerima ACC Rekapitulasi format BOS KBB-2 dan BOS-08 dan Surat Keputusan kemudian melakukan proses pengajuan SPP-LS dana BOS yang menghasikan dua rangkap SPP-LS, satu diarsipkan yang satu lagi diberikan ke Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memverifikasi SPP-LS menghasilkan dua rangkap SPM-LS, satu diarsipkan yang satu lagi diberikn ke KPPN Provinsi. KPPN Provinsi memverifikasi SPM-LS menghasilkan dua rangkap SP2D, satu diarsipkan dan satu lagi diberikan ke TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat.
D. TIM PKPS-BBM Provinsi Jawa Barat melakukang pencairan dana melalui rekening menghasilkan 2 rangkap data sekolah penerima dana bantuan BOS dan data rekening sekolah, I diberikan ke TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat dan satu lagi diberikan ke BANK. TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat membuat surat perjanjian pembeian bantuan yang diberikan ke SDN. SDN melakukan pengambilan uang ke BANK dengan membawa surat perjanjian pemberian dana dan juga rekening sekolah. BANK menerima data sekolah penerima bantuan dana BOS, data rekening sekolah, surat perjanjian pemberian bantuan dan rekening sekolah kemudian memberikan dana ke SDN.
E. SDN menerima dana kemudian menbuat kegiatan dana dan 3 rangkap LPJ, 1 diarsipkan 2 rangkap diberikan ke UPTD. UPTD mendata kegiatan dana dan LPJ jika tidak sesuai diberikan kembali ke SDN, jika sesuai maka mendata ulang dan melaporkan LPJ ke TIM PKPS-BBM Kabupaten Bandung Barat sebagai laporan tentang semua kegiatan yang diakukan SDN dalam penggunaan dana bantuan BOS berupa daftar LPJ dan Acc daftar LPJ.

3.8 Kelemahan Sistem Yang Sedang Berjalan

Pada dasarnya sistem yang berjalan tidak banyak perubahan untuk memperbaikinya, perbandingan sistem yang berjalan dan sistem yang diperbaiki atau yang diusulkan antara lain:

Tabel 3.2 Perbandingan sistem yang berjalan dan yang akan diperbaiki

No	Tujuan Penelitian	Sistem Yang Berjalan	Sistem Yang Diperbaiki
1	Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuanagn Pertanggung Jawaban Kegiatan Dana BOS	1. Input Dalam Penginputan Data dan Perhitungan Kegiatan Dana sering Terjadi Ksalahan 2. Proses Dalam Pemprosesan Data Masih Menggunakan Microsoft Exel 2003 3. Output - Laporan Pertanggung Jawaban	1. Proses Dengan Sudah Terkomputerisasi Dan Ada Aplikasi Khusus Yang Menangani Masalah Tersebut Maka Pengerjaan Akan Lebih Mudah dan Cepat 2. Proses Sudah Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 3. Output - Jurnal Umum - Buku Besar - Surplus/Difisit - Laporan Pertanggung Jawaban
2	Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuanagn Pertanggung Jawaban Kegiatan Dana BOS	1. Software - Microsoft Exel 2003 2. Dokumen - Format BOS KBB-2 dan BOS-8 - Kegiatan Dana BOS	1. Software - Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 2. Dokumen - Format BOS KBB-2 dan BOS-8 - Kegiatan Dana BOS